

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer harus disertai dengan kepemimpinan yang baik. Manajemen tidak hanya bertugas mencapai tujuan organisasi, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas para pemangku kepentingan yang mungkin bertentangan dalam organisasi. Mencapai efisiensi dan efektivitas adalah dua faktor kunci untuk menilai kinerja manajemen.. Kapasitas untuk mengevaluasi dan menerapkan data akuntansi adalah suatu keharusan bagi manajer untuk memenuhi semua tujuan tersebut. (Febriyanti, 2020)

Instansi pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja lembaga pemerintah menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kondisi sektor publik yang baik merupakan indikator efektivitas keuangan publik yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang diamanatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disepakati oleh DPR. APBN mencantumkan daftar penerimaan negara dengan jelas dan rinci. Anggaran APBN, termasuk pembaruan dan tahunan, ditetapkan melalui undang-undang. APBN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahun. Keputusan mengenai APBN dibuat melalui pengkajian antara Presiden dan DPR, berdasarkan usulan RAPBN dari Presiden serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Daerah (DPD). Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah dari dalam maupun luar negeri, merupakan bagian dari APBN.

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana seluruh pendapatannya digunakan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Bagi perkembangan perekonomian negara, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan pemerintah dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara di Indonesia adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari lembaga kementerian dan lembaga non kementerian.

Untuk memenuhi kebutuhan dana perbendaharaan dalam mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan, setiap kementerian dan lembaga non-kementerian di Indonesia memiliki jenis PNBP yang berbeda-beda. Salah satu lembaga yang mengatur dan mengelola PNBP adalah Kementerian Keuangan. Untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kementerian Keuangan menetapkan sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan instansi utama di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara, piutang, dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal merupakan unit vertikal DJKN yang berada di bawah Kantor Wilayah IX Semarang dan bertanggung jawab langsung kepada mereka. Tugas dan fungsi KPKNL Tegal ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 93.PMK.16/2013 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Vertikal DJKN. KPKNL Tegal bertujuan menjadi pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang yang bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. KPKNL Kota Tegal juga menetapkan target kinerja tahunan untuk wilayah Kota dan Kabupaten Tegal.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal yaitu PNBP atas Bea Lelang, PNBP atas Pengurusan Piutang Negara, dan PNBP atas Hasil

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Adapun permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal yaitu dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam penerimaan PNBPN di KPKNL Tegal. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran mengenai stabilitas dan keberlanjutan pendapatan negara dari sektor ini. Fluktuasi PNBPN dapat disebabkan oleh berbagai faktor, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di KPKNL Tegal beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi PNBPN yaitu ketika terdapat lebih banyak barang yang dilelang dalam satu periode, maka PNBPN cenderung meningkat, dan sebaliknya lalu koordinasi yang kurang baik antara unit-unit di KPKNL Tegal maupun dengan instansi lain dapat menghambat proses pengumpulan PNBPN dan mempengaruhi kinerja sekaligus efektivitas pengelolaan PNBPN di KPKNL. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal selama tahun 2020-2022?

2. Bagaimana efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal selama tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal selama tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal selama tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir, serta memperluas pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam memahami realisasi dan efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal.

2. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi KPKNL Kota Tegal, berupa saran dan rekomendasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dan mendorong penelitian baru.

1.5 Batasan Masalah

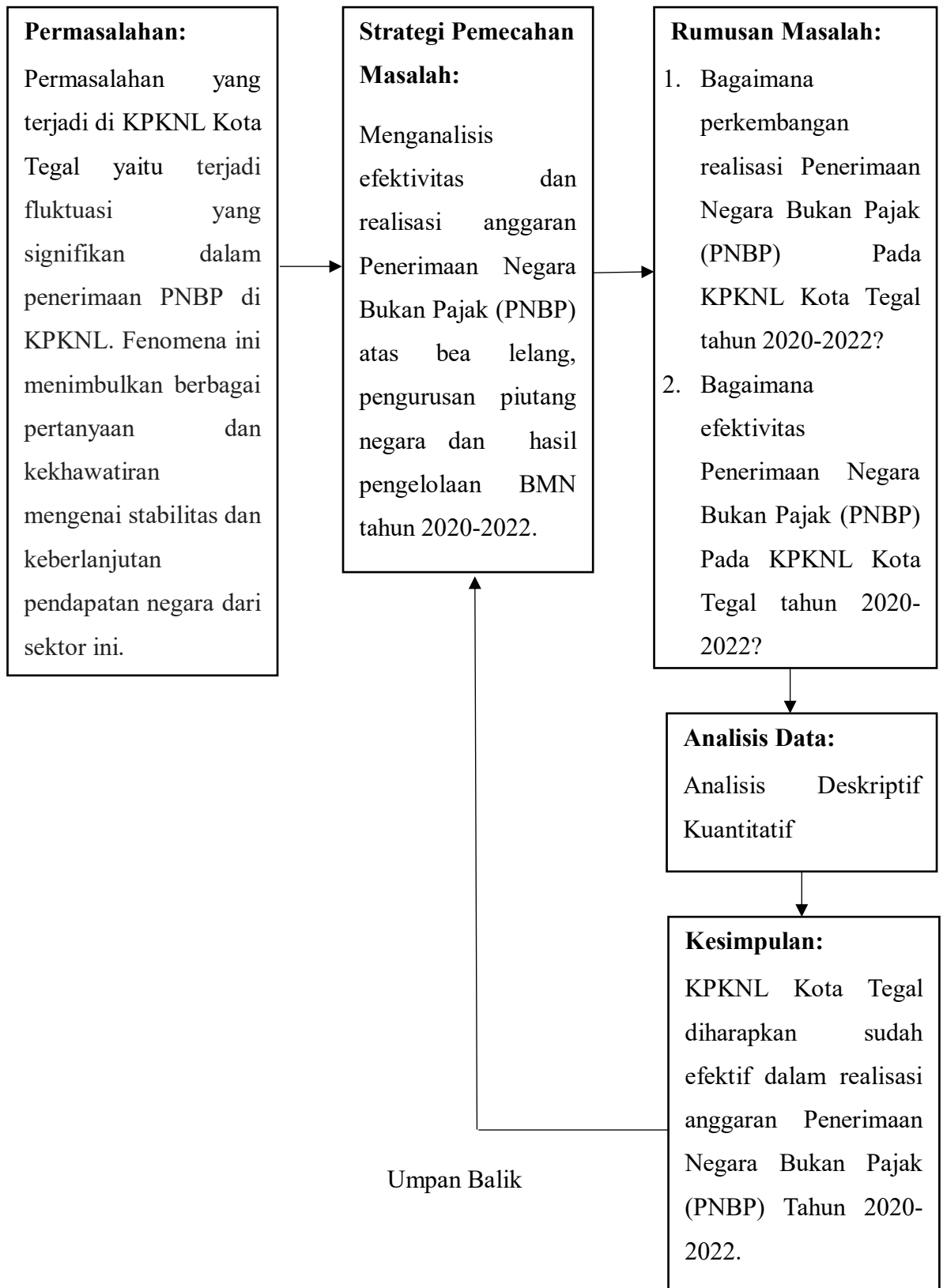
Batasan masalah sangat penting dalam penelitian karena memiliki batasan yang jelas dapat memudahkan diskusi atau pembahasan. Untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pada analisis efektivitas dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data anggaran PNBP bea lelang, PNBP pengurusan piutang negara dan PNBP hasil pengelolaan BMN pada KPKNL Kota Tegal periode 2020-2022.

1.6 Kerangka Berpikir

Permasalahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jenis bea lelang, pengurusan piutang negara, dan hasil pengelolaan BMN tahun 2020-2022 di KPKNL Kota Tegal belum sepenuhnya dioptimalkan, dan pendapatan PNBP mengalami fluktuasi setiap tahun. Oleh karena itu, peneliti menyusun strategi pemecahan masalah dengan menganalisis tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di KPKNL Kota Tegal. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dirumuskan permasalahannya, apakah pelaksanaan anggaran bea lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan BMN di KPKNL Kota Tegal sudah efektif. Untuk menentukan apakah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) efektif atau tidak, perlu dilakukan analisis data. Analisis data ini menggunakan rasio efektivitas untuk mengevaluasi apakah hasil dari PNBP, yang meliputi bea lelang, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan BMN di KPKNL Kota Tegal, tergolong efektif atau tidak. Hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam mencapai pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori tentang pengertian Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP Atas Bea Lelang, PNBP Atas Pengurusan Piutang Negara, PNBP Atas Hasil Pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap dan informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data lain yang di perlukan.